

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang pada anak kecil yang menyebabkan keterlambatan tumbuh kembang pada anak dibawah standar, dengan akibat jangka pendek dan jangka panjang. Penyebab utama gizi anak tidak terpenuhi baik dalam kualitas maupun kuantitas, pola asuh orang tua yang salah terutapa yang disebabkan oleh kurangnya Pendidikan dan pengetahuan ibu hamil dan menyusui mengenai gizi dan perawatan anak, buruknya kebersihan lingkungan tempat tinggal, masalah seperti kurangnya persediaan air bersih dan tidak adanya fasilitas toilet yang layak, yang dapat memengaruhi Kesehatan dan pertumbuhan anak. Perempuan hamil, ibu menyusui, dan anak kecil mempunyai akses yang tidak memadai dan terbatas terhadap fasilitas kesehatan yang diperlukan.

Stunting pada anak dapat memiliki efek baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Secara langsung, stunting memengaruhi perkembangan fisik, yang mengakibatkan tinggi badan anak menjadi lebih rendah dibandingkan dengan anak seusianya yang lainnya. Selain itu, pertumbuhan kognitif juga terpengaruh karena perkembangan otak yang terhambat, yang dapat memengaruhi kecerdasan anak.

Dalam jangka panjang, stunting meningkatkan risiko anak terkena berbagai penyakit seperti diabetes, obesitas, penyakit kardiovaskular, kanker pembuluh darah, stroke, dan cacat di usia tua. Dampak jangka panjang dari stunting memengaruhi kualitas sumber daya manusia di sebuah negara. Anak-anak, sebagai

generasi penerus bangsa, akan mengalami penurunan kualitas sumber daya manusia jika keterlambatan ini tidak segera diatasi.

Pemerintah Republik Indonesia memberikan perhatian khusus dalam penanganan stunting karena hal ini berkaitan dengan masa depan anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa. Selain itu, setiap anak memiliki hak untuk hidup sehat dan sejahtera. Presiden Republik Indonesia memberikan arahan untuk percepatan stunting di Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

**Tabel 1. 1 Status Gizi Balita Indonesia**

### Tren Status Gizi Balita Indonesia

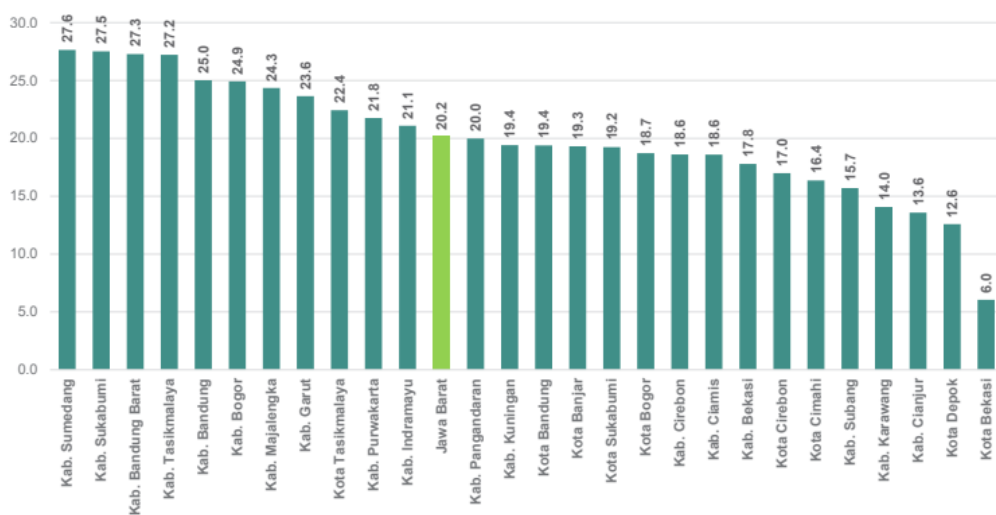
	Hasil Riskesdas		Hasil SSGI			
	2013	2018	2019	2021	2022	
<i>Stunting</i>	37,6	30,8	27,7	24,4	↓ 2,8 21,6	
<i>Wasting</i>	12,1	10,2	7,4	7,1	↑ 0,6 7,7	
<i>Underweight</i>	19,6	17,7	16,3	17,0	↑ 0,1 17,1	
<i>Overweight</i>	11,8	8,0	4,5	3,8	↓ 0,3 3,5	

**Sumber: Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022**

Sesuai arahan Presiden RI, upaya penurunan stunting diharapkan dapat dilakukan tidak hanya oleh Kementerian Kesehatan, namun juga oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah desa, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat. Melalui sinergi dan kerja sama berbagai sektor pemerintahan, diharapkan angka stunting di Indonesia dapat diturunkan. Berdasarkan hasil Survei

Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2022, angka stunting di Indonesia telah menurun menjadi 21,6%. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan target untuk menurunkan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2024.

PREVALENSI BALITA *STUNTING* (TINGGI BADAN MENURUT UMUR) BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT, SSGI 2022



**Diagram 1. 1 Prevelensi Balita Stunting Di Jawa Barat**

**Sumber: Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022**

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang diprioritaskan dalam percepatan penurunan stunting karena hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 menunjukkan angka balita stunting yang tinggi, yaitu 24,5%. Dalam hasil SSGI tersebut, terdapat 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, dengan 4 Kabupaten/Kota yang memiliki angka prevalensi stunting yang sangat tinggi, yaitu antara 30% hingga 39,9%. Kabupaten-kabupaten tersebut meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, dan Kota Cirebon. Saat ini, seperti

yang ditunjukkan dalam gambar di atas, angka stunting di Provinsi Jawa Barat telah menurun menjadi 20,2%.

Berdasarkan hasil SSGI 2021 Kabupaten Cianjur berada di peringkat ke-26 dalam penurunan angka Stunting dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, namun pada tahun 2022 Kabupaten Cianjur berhasil menempati peringkat ketiga karena berhasil menurunkan angka Stunting dari 33,7% menjadi 13,6% pada tahun 2022.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menetapkan bahwa salah satu kegiatan prioritas dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) adalah memberikan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting serta masyarakat. Pamantauan terhadap calon pasangan pengantin/usia subur (PUS) dan keluarga yang berisiko mengalami stunting juga merupakan bagian dari kegiatan ini. Oleh karena itu, peran tim pendamping keluarga menjadi sangat penting.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah membuat Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk mempercepat penurunan angka stunting di seluruh desa dan kabupaten di Indonesia. Berdasarkan buku Panduan Pelaksanaan Pendampingan Keluarga dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Di Tingkat Desa/Kelurahan, TPK terdiri dari tiga unsur yaitu bidan atau tenaga kesehatan, PKK, dan kader keluarga berencana (KB).

Tim Pendamping Keluarga adalah kumpulan tenaga yang terdiri atas bidan, kader TP-PKK, dan pelaksana KB yang memberikan penyuluhan, fasilitasi layanan rujukan, dan pendampingan program bantuan sosial kepada calon pengantin/pasangan calon pengantin dalam usia subur dan dalam masa kehamilan,

memberikan pendampingan seperti penerimaan program bantuan kepada ibu hamil, ibu nifas dan anak usia 0-59 bulan. TPK juga melakukan survei terhadap keluarga berisiko stunting untuk mengidentifikasi faktor risiko stunting sejak dini. Dalam situasi yang berbeda, komposisi tim pendamping keluarga dapat disesuaikan dengan berkolaborasi dengan bidan dari desa dan kabupaten, serta dengan melibatkan perawat dan petugas kesehatan lainnya.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cianjur telah membentuk 1.908 Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari kader, bidan KB, dan Tim Penggerak PKK, salah satunya adalah Tim Pendamping Keluarga di Desa Bojong yang terletak di Kecamatan Karangtengah. Selain memiliki relevansi dengan penelitian Pemerintah Desa Bojong memberikan dukungan kepada peneliti untuk melakukan penelitian terhadap Tim Pendamping Keluarga di Desa Bojong.

Tim Pendamping Keluarga tidak terlepas dari Koordinasi yang dilaksanakan oleh orang-orang yang terlibat dalam menjalankan suatu program, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai “Koordinasi Tim Pendamping Keluarga dalam Pencegahan Stunting Di Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Cianjur”. Penelitian ini menganalisis koordinasi yang dilaksanakan oleh TPK dalam pencegahan Stunting.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat didefinisikan bahwa masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam pencegahan stunting di Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.
2. Kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam pencegahan stunting di Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, yang dijadikan pernyataan masalah (*problem statement*) dalam penelitian ini adalah koordinasi dalam pencegahan stunting yang diduga disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam pencegahan stunting di Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diajukan pertanyaan masalah (*problem question*) sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan koordinasi pada aspek tujuan yang jelas (*clearly defined goals*) dalam pencegahan stunting di Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur ?
- b. Bagaimana pelaksanaan koordinasi pada aspek garis wewenang dan tanggungjawab yang jelas (*clear lines of authority and responsibility*) dalam pencegahan stunting di Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur ?
- c. Bagaimana pelaksanaan koordinasi aspek program kebijakan yang tepat dan komprehensif (*precise and comprehensive programs and policies*) dalam

pencegahan stunting di Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur ?

- d. Bagaimana pelaksanaan koordinasi pada aspek kerjasama (*cooperation*) dalam pencegahan stunting di Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur ?
- e. Bagaimana pelaksanaan koordinasi pada aspek komunikasi yang efektif (*effective communication*) dalam pencegahan stunting di Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur ?
- f. Bagaimana implementasi koordinasi pada aspek kepemimpinan dan pengawasan yang efektif (*effective leadership and supervision*) dalam pencegahan stunting di Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui:

- a. Pelaksanaan koordinasi pada aspek tujuan yang jelas (*clearly defined goals*) dalam pencegahan stunting di Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.
- b. Pelaksanaan koordinasi pada aspek implementasi garis wewenang dan tanggungjawab yang jelas (*clear lines of authority and responsibility*) dalam pencegahan stunting di Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.
- c. Pelaksanaan koordinasi pada aspek program kebijakan yang tepat dan komprehensif (*precise and comprehensive programs and policies*) dalam

pencegahan stunting di Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.

- d. Pelaksanaan koordinasi pada aspek kerjasama (*cooperation*) dalam pencegahan stunting di Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.
- e. Pelaksanaan koordinasi pada aspek komunikasi yang efektif (*effective communication*) dalam pencegahan stunting di Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.
- f. Implementasi koordinasi pada aspek kepemimpinan dan pengawasan yang efektif (*effective leadership and supervision*) dalam pencegahan stunting di Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.

#### **E. Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

##### 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang baru bagi peneliti mengenai koordinasi tim pendamping keluarga dalam pencegahan Stunting di Desa Bojong, dapat bermanfaat dalam mengembangkan teori Koordinasi yang dikemukakan oleh D. Chandra Bose (2012), serta dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

##### 2) Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberi masukan sebagai bahan pertimbangan bagi dinas yang bersangkutan dalam memperbaiki koordinasi yang terjalin dalam sebuah organisasi, serta diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang dapat



menambah pengetahuan bagi peneliti serta semua pihak yang terkait dalam permasalahan yang diteliti.

#### **F. Kerangka Penelitian**

Penelitian ini membahas topik mengenai koordinasi di dalam Tim Pendamping Keluarga dalam Pencegahan Stunting di Desa Bojong, dimana Tim Pendamping Keluarga tersebut terdiri dari Kader, TP-PKK, dan juga Bidan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mengacu pada teori yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti. Adapun teori yang dibahas dalam penelitian ini menggunakan teori Administrasi Publik sebagai *grand theory*, Teori Organisasi sebagai *middle theory*, dan juga teori teknik Koordinasi yang efektif dikemukakan oleh D. Chandra Bose sebagai *operational theory* karena teori ini memiliki sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.

Menurut Zauhar dalam William Djani (2022), administrasi publik mengacu pada kerjasama dalam organisasi publik untuk menyediakan layanan publik. Administrasi publik menggambarkan seperti apa pejabat publik berhasil mengelola pemerintahan dan menekankan seperti apa partisipasi mereka dalam memecahkan berbagai macam masalah publik dengan baik, juga menekankan seperti apa partisipasi aparatnya dalam memecahkan masalah publik.

Menurut Henry dalam William Djani (2022), administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dengan praktik yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai pemerintah dalam hubungannya bersama masyarakat serta untuk memberikan dorongan untuk kebijakan publik supaya dapat merespon kebutuhan publik dengan lebih baik.

Menurut Arie (2018), organisasi pada hakiktnya adalah sekelompok orang yang berkumpul, berkolaborasi, merencanakan, dan menggunakan sumberdaya, sarana dan prasarana, data, dan lain-lain yang digunakan secara efisien dan efektif untuk membentuk suatu organisasi guna mencapai tujuan dengan mengatur dan mengelola secara rasional dan sistematis. Menurut Stephen P. Robbins dalam Arie (2018), organisasi merupakan unit sosial yang dikelola dengan sengaja, memiliki batasan yang cukup jelas, dan berfungsi secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama. Sementara itu, James D. Mooney menjelaskan bahwa organisasi adalah suatu bentuk dari setiap kumpulan manusia yang bertujuan untuk mencapai sasaran bersama.

Menurut D. Chandra Bose (2012), pengorganisasian berarti mengidentifikasi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilakukan, membaginya di antara individu-individu, serta menjalin hubungan baik dan tanggung jawab antar individu untuk mencapai tujuan bersama. Proses organisasi meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Identifikasi semua orang yang terlibat dalam kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain, koordinasi berarti memadukan secara harmonis kegiatan-kegiatan berbagai departemen untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Setiap manajer, seperti halnya konduktor orkestra, harus melakukan penyesuaian terus menerus untuk mengarahkan dan mengarahkan semua musisi dalam orkestra agar menghasilkan musik yang indah dan harmoni.

Mooney dan Reiley dalam Bose (2012), mengemukakan definisi dari koordinasi yang merupakan suatu pengaturan yang teratur dari upaya kelompok

untuk memberikan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama. Henri Fayol menekankan pentingnya koordinasi untuk kelancaran suatu organisasi. Dalam kata-katanya, “Koordinasi berarti menyelaraskan seluruh kegiatan suatu organisasi untuk memfasilitasi kerja dan keberhasilannya”.

D. Chandra Bose (2012), mengemukakan koordinasi yang efektif dapat dicapai dengan bantuan teknik-teknik berikut:

1. Tujuan yang Jelas (*Clearly defined goals*)

Tujuan keseluruhan perusahaan harus dijabarkan dengan jelas dan harus dipahami dengan baik oleh setiap orang di perusahaan. Tim Pendamping Keluarga memiliki tujuan untuk mencegah Stunting yang mungkin terjadi kepada balita, oleh karena itu TPK Desa Bojong senantiasa mendampingi calon pengantin untuk mempersiapkan kehamilan, mendampingi ibu hamil untuk mempersiapkan kelahiran, mendampingi ibu menyusui dan balita agar balita mendapat nutrisi yang cukup, sehingga pencegahan Stunting tersebut diharapkan dapat membantu percepatan penurunan di Desa Bojong.

2. Garis Wewenang dan Tanggungjawab yang Jelas (*Clear lines of authority and responsibility*)

Koordinasi hanya dapat tercapai jika terdapat indikasi yang jelas mengenai garis wewenang dan tanggung jawab. Garis wewenang yang jelas menetapkan siapa yang bertanggung jawab kepada siapa, sehingga memudahkan dalam pengelolaan tugas dan tanggung jawab.

Tim pendamping keluarga yang terdiri dari bidan desa, kader TP-PKK, dan kader Keluarga Berencana. Bidan desa memiliki peran sebagai koordinator

pendamping keluarga serta penyedia layanan kesehatan. Kader TP-PKK desa memiliki peran sebagai penggerak serta perantara pelayanan keluarga. Sedangkan, kader Keluarga Berencana berperan sebagai orang yang mencatat serta melaporkan data serta perkembangan pelaksanaan pendampingan terhadap keluarga ataupun kelompok yang menjadi sasaran.

### 3. Program dan Kebijakan yang Tept dan Komprehensif (*Precise and comprehensive programs and policies*)

Prosedur lain untuk mencapai koordinasi yang efektif adalah dengan menerapkan program dan kebijakan yang jelas dan pasti. Tim Pendamping Keluarga Desa berkoordinasi dengan TPPS Desa dalam hal perencanaan kerja, pengelolaan sumber daya, dan pemecahan masalah yang terkait dengan pendampingan keluarga di lapangan.

### 4. Kerjasama (*Cooperation*)

Koordinasi harus dibarengi dengan kerja sama. Dengan demikian koordinasi hanya dapat tercapai jika individu-individu dalam organisasi bersedia saling membantu secara sukarela. Tim Pendamping Keluarga Desa Bojong senantiasa bersinergi dan berkerja sama secara sukarela dalam melakukan pendampingan dalam pencegahan Stunting.

### 5. Komunikasi yang Efektif (*Effective communication*)

Komunikasi yang efektif adalah kunci koordinasi yang baik. Hal ini dapat dicapai melalui kontak pribadi dan saluran komunikasi yang dapat diandalkan. Tim Pendamping Keluarga Desa Bojong melakukan komunikasi secara langsung

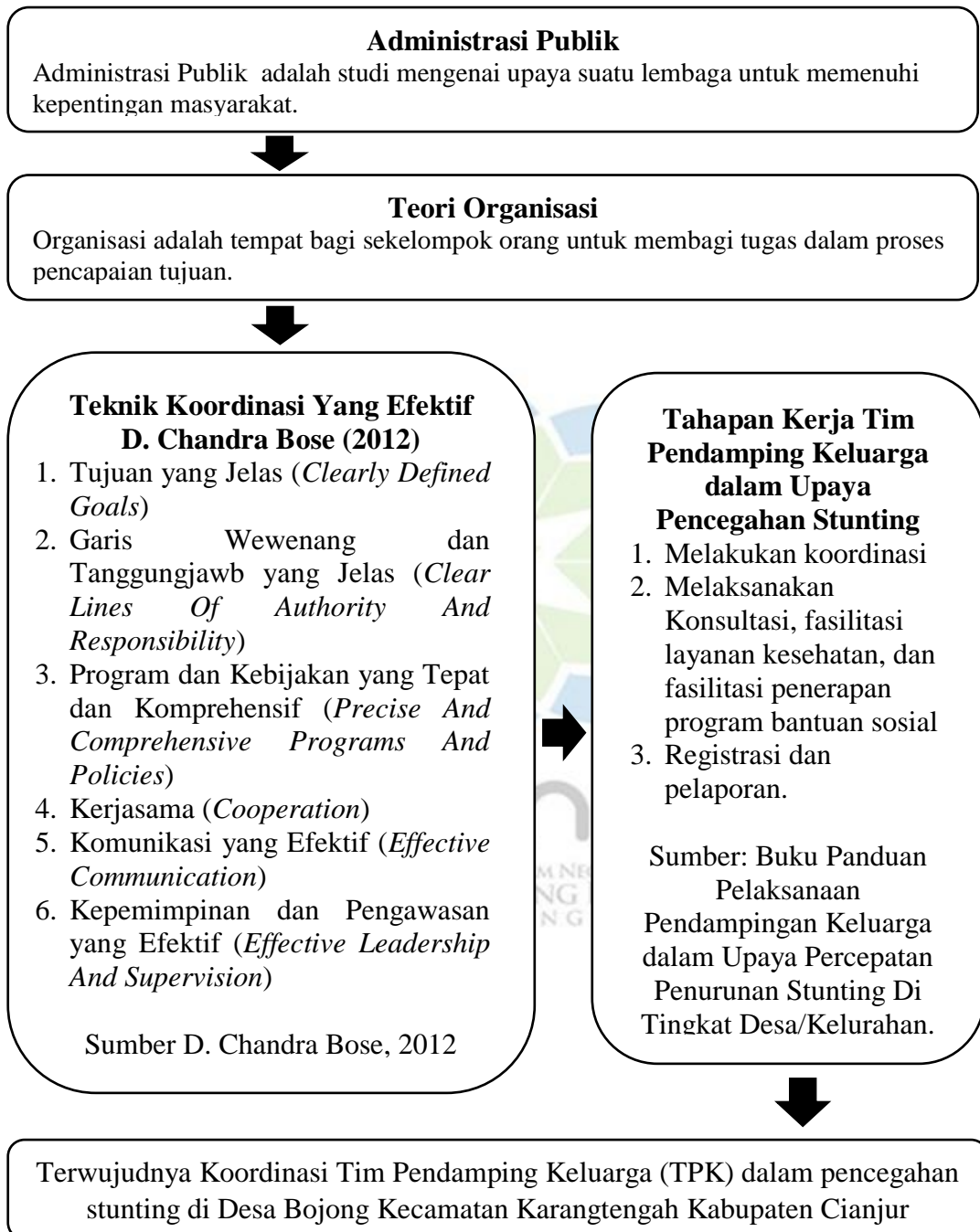
maupun melalui alat komunikasi untuk berkoordinasi mengenai program atau kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencegahan Stunting.

6. Kepemimpinan dan Pengawasan yang Efektif (*Effective leadership and supervision*)

Kepemimpinan yang efektif memastikan koordinasi yang baik selama tahap perencanaan dan pelaksanaan. Pengawasan yang tepat sangat penting untuk mengarahkan aktivitas individu ke arah yang benar. Di Desa Bojong, ketua pelaksana TPK adalah Ketua TP-PKK Desa, yang bertanggung jawab untuk koordinasi dan pengawasan terhadap tim pendamping keluarga. Sementara itu, pengawasan, monitoring, dan evaluasi dilakukan oleh TPPS Kabupaten.



Lebih lanjut peneliti membuat kerangka pemikiran dari uraian teori tersebut sebagai berikut:



**Gambar 1. 1 Paradigma Pemikiran Tentang Koordinasi Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam pencegahan stunting di Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur**

Sumber: Diolah Peneliti, 2024